

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Umum Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis**

Kabupaten Bengkalis ialah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, yang memiliki posisi geografis yang strategis di bagian pesisir timur Pulau Sumatera. Kabupaten ini mencakup beberapa pulau besar dan kecil, dengan Pulau Bengkalis sebagai pulau utama yang menjadi pusat pemerintahan. Kabupaten Bengkalis secara geografis terletak pada Kabupaten Bengkalis meliputi bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 2°30' Lintang Utara (LU), -0°17' Lintang Utara atau 100°52' Bujur Timur (BT), -102°52' Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646.83 km<sup>2</sup>, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan.

Kota Bengkalis, yang merupakan pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Bengkalis, terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis mencakup sebagian area di Pulau Sumatera, termasuk Duri dan Dumai. Jarak antara Duri dan Bengkalis adalah 106 kilometer, sementara jarak antara Dumai dan Bengkalis adalah 78 kilometer; kedua wilayah ini dipisahkan oleh laut. Untuk transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini, tersedia kapal penumpang (ferry) yang beroperasi dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu, terdapat juga kapal Roro, yang dapat mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Dengan demikian, perjalanan menuju Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak mengalami kesulitan berarti. Namun, perlu dicatat bahwa jadwal kapal penumpang dan barang masih terbatas, dengan hanya satu hingga dua kali perjalanan per hari.

##### **2. Sejarah Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru**

Perpustakaan Mukhrim merupakan perpustakaan desa yang beralamatkan di Jl. Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Perpustakaan mukhrim berdiri pada tahun 2012 yang sebelumnya bernama Perpustakaan Desa

Harapan Baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Windy Setia Ningsih selaku Kepala Perpustakaan pada 22 April 2024 pukul 9.30 WIB dan 26 April 2024 pukul 11.00 WIB, setelah melihat adanya aktivitas yang diadakan dari Perpustakaan Mukhrim maka pihak Pemerintah Daerah Bengkalis atau usulan dari Bupati Bengkalis meminta untuk menjadikan perpustakaan ini berbasis inklusi sosial atau bisa disebut TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial). Perpustakaan berbasis inklusi sosial ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi lebih maju lagi baik dari segi ekonomi dan sosial.

### **3. Visi dan Misi Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru**

Adapun visi dan misi dari perpustakaan mukhrim ialah :

Visi :

Menjadikan perpustakaan desa sebagai sumber informasi rekreasi dan tempat masyarakat belajar sepanjang hayat long life education.

Misi :

- meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya transformasi informasi pengetahuan dan pengalaman melalui pustaka
- menumbuhkan minat baca masyarakat dari usia dini meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengembangan dan pemberdayaan perpustakaan desa
- menjadikan perpustakaan yang nyaman.
- Motto membaca adalah guru terbaik.

### **4. Program Pengembangan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial**

Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru di Kabupaten Bengkalis adalah perpustakaan umum desa yang telah ditetapkan sebagai perpustakaan berbasis inklusi sosial sejak tahun 2022. Program ini telah diimplementasikan dengan melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan bersama masyarakat, yang merupakan bagian dari pengembangan perpustakaan desa berbasis inklusi

sosial. Informasi mengenai kegiatan tersebut dapat dilihat di halaman Facebook dan Instagram Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang diamanahkan oleh Perpustakaan Nasional, menjadi tanggung jawab bidang pembinaan dan pengembangan bahan pustaka. Sebagai kepala perpustakaan, Ibu Windy, saat ini tengah berpacu untuk menjadikan perpustakaan terbaik di nasional terbukti dengan adanya pelatihan-pelatihan yang saat ini sudah menyentuh angka 70% dan maksimal harus mencapai 90% yang nantinya akan menerima penghargaan sebagai perpustakaan kabupaten/kota terbaik dalam implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari Perpustakaan Nasional.

Adapun program yang dilakukan Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial adalah :

- a. Pengembangan Kreativitas Masyarakat dan UMKM, pengembangan kreativitas masyarakat merupakan salah satu kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis, kegiatan yang dilakukan yaitu berupa pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat, pelatihan yang dilakukan yaitu dengan cara mengolah dan membuat produk bernilai jual, hal ini diharapkan dapat menunjang potensi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat serta menambah wawasan bagi pengelola perpustakaan desa sehingga dapat melakukan pelatihan-pelatihan lainnya di perpustakaan desa masing-masing. Peserta dalam pelatihan yang dilakukan yaitu pengelola perpustakaan desa, perangkat desa, dan beberapa orang masyarakat dari desa tersebut.

Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Pelatihan Pembuatan Piring dari lidi sawit.

2. Pelatihan membuat kerajinan dari benang wol bersama ibu-ibu PKK.

b. Peningkatan Literasi Berbasis Tik

Kegiatan selanjutnya yang mendukung program pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah peningkatan literasi berbasis Tik, kegiatan ini merupakan pelatihan mengenai penambahan wawasan teknologi bagi pengelola perpustakaan desa dan perangkat desa. Peningkatan literasi berbasis tik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan dalam dunia IT. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Pelatihan Dasar Komputer.
2. Pelatihan Promosi Produk melalui Media Sosial.

Kegiatan di atas merupakan bentuk pengimplementasian yang telah dilakukan Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, di mana Perpustakaan menyediakan fasilitas baik berupa tempat, pemateri, alat, dan bahan-bahan.

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis dengan jumlah informan sebanyak 4 orang yang terdiri dari Kepala Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis, 2 orang Bidang Pengembangan dan pengawasan Perpustakaan, dan 1 orang pengelola perpustakaan desa yang dikembangkan dan dibina menjadi perpustakaan desa dengan layanan berbasis inklusi sosial. Kepala Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis, Ibu Windi Setia Ningsih, mengenai perkembangan dan evaluasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

a. Evaluasi *Context* (Konteks)

Berdasarkan hasil analisis, program inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penjelasan konteks dalam

evaluasi dengan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) bertujuan untuk memahami latar belakang, tujuan, kebutuhan, dan lingkungan di mana suatu program dilaksanakan. Dalam hal ini, konteks bertindak sebagai evaluasi awal untuk menentukan apakah program yang akan atau sedang dijalankan relevan dengan kondisi atau masalah yang ada di masyarakat atau lingkungan tertentu. Namun, diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam program agar lebih spesifik menjawab kebutuhan unik dari berbagai kelompok masyarakat.

*“Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru mulai mengimplementasikan program perpustakaan berbasis inklusi sosial sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PERPUSNAS sejak Tahun 2022, perpustakaan kami saat ini sedang giat-giatnya melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dan publikasi untuk meningkatkan index atau skor perpustakaan terbaik nasional yang mana bisa dilihat dari SIM Perpustakaan Nasional skor Perpustakaan Mukhrim sudah mencapai angka 80% yang artinya sudah hijau untuk bisa berada ditingkat nasional”.*

Lebih lanjut Ibu Windi mengatakan bahwa:

*“Tentu, tujuan utama dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan akses informasi dan literasi bagi seluruh masyarakat di Desa Harapan Baru, terutama bagi anak-anak yang saat ini lebih sering bermain gadget dan untuk mengurangi hal itu kami membuat kegiatan bimbel sambil bermain. Kami juga ingin menciptakan ruang inklusif di mana semua orang bisa belajar bersama tanpa memandang status sosial atau usia”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan Mukhrim di Desa Harapan Baru telah mengimplementasikan program berbasis inklusi sosial sesuai amanat PERPUSNAS sejak tahun 2022. Perpustakaan ini secara aktif melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk

meningkatkan indeks atau skor perpustakaan di tingkat nasional. Saat ini, skor Perpustakaan Mukhrim telah mencapai 80%, yang menunjukkan status hijau dan menandakan kesiapan perpustakaan untuk bersaing di tingkat nasional. Upaya ini menunjukkan komitmen perpustakaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan keterlibatan masyarakat.

b. Evaluasi *Input* (Masukan)

Evaluasi input menilai sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan material yang digunakan dalam pelaksanaan program. Pengelola perpustakaan desa Bu Marsha juga mengatakan bahwa:

*“Program ini dirancang berdasarkan kebutuhan yang kami lihat di masyarakat. Kami melakukan survei awal dan berbicara dengan beberapa pemimpin komunitas untuk memahami apa yang paling dibutuhkan. Setelah itu, kami mulai merencanakan kegiatan-kegiatan seperti kelas literasi, pelatihan keterampilan, dan layanan konsultasi yang dijalankan secara rutin di perpustakaan. Implementasinya melibatkan partisipasi aktif dari staf perpustakaan dan juga kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti ibu-ibu PKK, dan karang taruna”.*

Dalam wawancara dengan Bapak Haryanto selaku perangkat desa yang mengawasi kegiatan perpustakaan mengatakan bahwa :

*“Kami terus memantau pelaksanaan program dengan mengadakan rapat evaluasi secara berkala. Secara umum, program ini berjalan sesuai dengan rencana, namun memang ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan di tengah jalan, terutama untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Kami juga mengumpulkan feedback dari peserta untuk memastikan bahwa kegiatan yang kami lakukan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan mereka”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui survei dan diskusi dengan pemimpin komunitas. Program ini melibatkan kegiatan seperti kelas literasi, pelatihan keterampilan, dan layanan konsultasi yang dijalankan rutin di perpustakaan. Pelaksanaannya melibatkan staf perpustakaan dan juga bekerja sama dengan lembaga lokal seperti ibu-ibu PKK dan karang taruna. Program ini terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Meskipun berjalan sesuai rencana, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan kegiatan yang diadakan benar-benar bermanfaat bagi mereka.

c. Evaluasi *Process* (Proses)

Evaluasi proses mengamati pelaksanaan program secara langsung, termasuk kegiatan yang dilakukan, metode yang digunakan, dan partisipasi masyarakat. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan program inklusi sosial, seperti pelatihan keterampilan, dan layanan perpustakaan, telah dilaksanakan secara konsisten. Tetapi terdapat hambatan dalam mendapatkan partisipasi aktif dari beberapa kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Seperti hasil wawancara dengan Bu Windi beliau mengatakan bahwa:

*“Proses perencanaan program ini melibatkan pustakawan, pemerintah desa, serta perwakilan dari masyarakat. Kami melakukan diskusi kelompok untuk memahami kebutuhan masyarakat, lalu menyusun kegiatan yang sesuai, seperti program membaca untuk anak-anak dan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat. Kami memulai dengan merancang program inklusi sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi melalui berbagai media promosi. Selanjutnya, kami mengimplementasikan program tersebut dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan mengadakan sesi pelatihan serta kegiatan interaktif”.*

Selanjutnya Bapak Uli selaku perangkat desa mengatakan bahwa:

*"Kami melibatkan masyarakat dengan mengadakan forum dan pertemuan untuk mendengar masukan mereka. Kami juga menyediakan program yang sekiranya dapat diikuti oleh masyarakat dengan melihat potensi yang ada di desa ini dan menambahkan fasilitas yang memudahkan agar semua orang bisa ikut serta".*

Bu Marsha juga mengatakan bahwa:

*"Kami secara rutin mengevaluasi program dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat dan menganalisis data pengunjung. Kami juga memantau hasilnya melalui survei dan laporan dari mitra kerja untuk menemukan bagian yang perlu diperbaiki".*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program ini dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipromosikan melalui berbagai media. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung, dengan kegiatan pelatihan yang sesuai dengan potensi lokal. Masyarakat juga diajak memberi masukan melalui forum dan pertemuan, dan disediakan fasilitas agar semua bisa ikut serta. Evaluasi program dilakukan rutin dengan mengumpulkan masukan dan memantau hasil untuk terus memperbaiki program ini.

d. Evaluasi Product (Produk)

Evaluasi produk mengukur hasil dan dampak dari program inklusi sosial, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil menunjukkan peningkatan literasi dan keterampilan di kalangan masyarakat, terutama di antara anak-anak dan kaum muda. Namun, dampak jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di masyarakat, masih memerlukan waktu untuk terlihat secara nyata.

Dalam wawancara Ibu Windi mengatakan bahwa:



*“Ya, dalam jangka pendek, kami melihat dampak yang positif. Misalnya, anak-anak dan remaja yang mengikuti kegiatan yang ada di perpustakaan ini seperti bimbel membaca, mewarnai, dan ikut kegiatan literasi lainnya menunjukkan peningkatan dalam kemampuan membaca dan menulis. Kami melihat peningkatan signifikan dalam jumlah pengunjung dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Program-program baik dari pelatihan juga telah membantu memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Beberapa masyarakat juga melaporkan bahwa mereka mendapatkan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Namun, untuk dampak jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, kami masih perlu waktu untuk melihat hasilnya secara nyata”.*

Bapak Uli juga mengatakan bahwa:

*“kedepannya kami akan terus bekerja sama dan berkolaborasi lebih banyak dengan pihak luar sebagai upaya mengatasi keterbatasan sumber daya yang ada. Kami juga perlu memperbaiki cara kami berkomunikasi dan membuat program ini lebih inklusif, sehingga lebih banyak masyarakat yang mau ikut serta. Selain itu, program dan kegiatan ini bisa diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang dan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, agar dampaknya lebih besar dan bertahan lama”.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk saat ini, program perpustakaan di Desa Harapan Baru sudah menunjukkan hasil yang positif. Anak-anak dan remaja yang mengikuti berbagai kegiatan di perpustakaan mengalami peningkatan kemampuan membaca dan menulis. Jumlah pengunjung juga meningkat, dan program pelatihan yang ada telah membantu memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan akses ke layanan perpustakaan. Beberapa warga bahkan berhasil mendapatkan keterampilan baru yang dapat

membantu meningkatkan penghasilan mereka. Tetapi, untuk melihat dampak jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi, masih diperlukan waktu. kedepannya perpustakaan berencana untuk lebih banyak bekerja sama dengan pihak luar guna mengatasi keterbatasan sumber daya. Selain itu, mereka juga akan memperbaiki strategi komunikasi dan membuat program lebih inklusif, agar lebih banyak masyarakat yang mau berpartisipasi. Program ini juga akan diperluas untuk menjangkau lebih banyak orang dan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan sosial, sehingga dampaknya bisa lebih besar dan berkelanjutan.

## **2. Kendala dalam pelaksanaan program berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis**

Dalam melaksanakan program berbasis inklusi sosial di perpustakaan, ada beberapa kendala umum yang mungkin dihadapi.

### **1) Kurangnya partisipasi masyarakat**

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis bisa menjadi salah satu kendala utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat: Kurangnya Sosialisasi dan Informasi Salah satu penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat bisa jadi karena kurangnya sosialisasi mengenai program-program yang diadakan di perpustakaan. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang manfaat atau tujuan dari program inklusi sosial ini, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk berpartisipasi. Keterbatasan Akses Fisik dan Waktu Akses yang sulit ke perpustakaan, baik karena lokasi yang jauh dari pusat kegiatan masyarakat atau karena jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan waktu luang masyarakat, dapat menjadi penghalang. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesibukan pekerjaan atau kegiatan lain mungkin merasa sulit untuk meluangkan waktu untuk berpartisipasi. Kurangnya Relevansi Program dengan Kebutuhan Masyarakat Jika program-program yang dijalankan tidak sesuai dengan kebutuhan atau minat

masyarakat, maka partisipasi akan rendah. Masyarakat mungkin merasa bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat langsung atau tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kendala Sosial dan Ekonomi Beberapa masyarakat mungkin menghadapi kendala ekonomi yang membuat mereka tidak dapat berpartisipasi, seperti biaya transportasi atau kebutuhan untuk bekerja. Selain itu, adanya perbedaan sosial atau budaya bisa membuat beberapa kelompok masyarakat merasa terpinggirkan atau tidak nyaman untuk ikut serta dalam program tersebut. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Windi beliau mengatakan bahwa:

*“Jadi, salah satu masalah utama yang kami hadapi di Perpustakaan Mukhrim adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun kami sudah mengadakan berbagai program menarik, ternyata partisipasi masyarakat tidak seperti yang kami harapkan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi. Kadang, masyarakat nggak tahu tentang program-program yang kami tawarkan karena sosialisasi kami masih terbatas. Mungkin kami belum cukup mempromosikan kegiatan kami atau menggunakan saluran informasi yang tepat, sehingga banyak orang yang belum tahu ada program-program tersebut. Selain itu, ada juga masalah akses. Beberapa warga mungkin merasa bahwa lokasi perpustakaan atau jadwal program yang kami adakan tidak sesuai dengan waktu atau tempat yang nyaman bagi mereka. Ini bikin mereka jadi malas untuk datang atau ikut serta. Kami juga melihat bahwa beberapa program mungkin tidak terlalu relevan dengan kebutuhan atau minat masyarakat. Kalau program yang kami tawarkan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan atau minati, mereka jadi kurang termotivasi untuk ikut. Jadi, penting banget buat kami untuk memastikan bahwa program yang kami jalankan memang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dan, kadang ada juga masalah kepercayaan. Beberapa orang mungkin merasa skeptis tentang manfaat program-program ini atau merasa tidak terlibat dalam proses perencanaannya. Ini bisa bikin mereka kurang antusias untuk berpartisipasi.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Perpustakaan

Mukhrim menghadapi masalah utama berupa kurangnya partisipasi masyarakat dalam program-program yang diadakan. Penyebab utama masalah ini meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi tentang program, masalah akses seperti lokasi dan jadwal yang tidak nyaman bagi masyarakat, serta relevansi program yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau minat mereka. Selain itu, ada juga masalah kepercayaan di mana beberapa warga merasa skeptis terhadap manfaat program dan kurang terlibat dalam proses perencanaannya. Untuk meningkatkan partisipasi, perpustakaan perlu memperbaiki sosialisasi, menyesuaikan jadwal dan lokasi program, memastikan relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, dan membangun kepercayaan dengan menunjukkan manfaat nyata dari program-program tersebut.

## 2) Keterbatasan anggaran dana

Keterbatasan anggaran dana sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Mukhrim Desa Harapan Baru Kabupaten Bengkalis. Ketika anggaran yang tersedia terbatas, pengelolaan program menjadi lebih sulit dan banyak aspek yang penting untuk keberhasilan program bisa terganggu. Pertama, keterbatasan dana sering kali menghambat kemampuan perpustakaan untuk menyediakan fasilitas yang memadai. Misalnya, tanpa anggaran yang cukup, perpustakaan mungkin tidak dapat membeli peralatan yang diperlukan, seperti komputer, perangkat teknologi, atau buku dan materi bacaan yang relevan. Keterbatasan dalam hal ini dapat membuat program-program yang dirancang menjadi kurang efektif atau bahkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan perpustakaan untuk melakukan sosialisasi dan promosi yang efektif. Program inklusi sosial memerlukan promosi agar masyarakat tahu dan tertarik untuk berpartisipasi. Dengan dana yang terbatas, upaya promosi seperti cetak materi informasi, pengadaan media, atau pelaksanaan kampanye kesadaran bisa terhambat, mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program. Keterbatasan dana juga dapat

menghambat kemampuan perpustakaan untuk merekrut dan melatih staf yang berkualitas. Staf yang terlatih dan berpengalaman sangat penting untuk menjalankan program inklusi sosial dengan baik. Jika anggaran tidak mencukupi, perpustakaan mungkin tidak dapat mempekerjakan tenaga kerja tambahan atau memberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan staf yang ada, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Terakhir, anggaran yang terbatas juga mempengaruhi kemampuan perpustakaan untuk merespons kebutuhan dan umpan balik masyarakat dengan cepat. Jika ada masalah atau kebutuhan mendesak yang muncul selama pelaksanaan program, kurangnya dana dapat membatasi kapasitas perpustakaan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran dana menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan program berbasis inklusi sosial. Kemudian bapak Uli juga mengatakan bahwa:

*“Anggaran dana yang terbatas di Perpustakaan Mukhrim memang bikin kami agak kewalahan. Dengan dana yang terbatas, kami sering kali kesulitan untuk membeli fasilitas yang diperlukan, seperti buku-buku baru atau alat-alat teknologi. Akibatnya, beberapa program yang kami rencanakan harus ditunda atau bahkan dibatalkan karena kami nggak punya peralatan yang cukup. Selain itu, promosi program juga jadi masalah. Karena anggaran terbatas, kami nggak bisa melakukan promosi besar-besaran. Misalnya, kami kesulitan untuk mencetak brosur atau mengadakan acara promosi yang bisa menarik perhatian masyarakat. Jadi, kadang masyarakat nggak tahu tentang program yang kami tawarkan, dan akhirnya partisipasi mereka jadi kurang. Kami juga punya kendala dalam hal staf. Dengan dana yang terbatas, kami kesulitan untuk merekrut staf tambahan atau memberi pelatihan yang diperlukan untuk staf yang ada. Akibatnya, kualitas program jadi kurang optimal karena staf kami mungkin belum sepenuhnya siap.*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan anggaran dana yang terbatas di Perpustakaan Mukhrim berdampak signifikan pada pelaksanaan program. Dengan dana yang terbatas, perpustakaan mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas penting seperti buku dan alat teknologi, yang menyebabkan penundaan atau pembatalan program. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menghambat upaya promosi, membuat masyarakat kurang mengetahui tentang program yang ada dan berakibat pada rendahnya partisipasi. Kendala lainnya adalah kesulitan dalam merekrut dan melatih staf, yang mengurangi kualitas pelaksanaan program. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan anggaran atau solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan fasilitas, promosi, dan pengembangan staf.

### **Pembahasan**

Model CIPP yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam adalah salah satu pendekatan evaluasi yang komprehensif dan berfokus pada peningkatan program secara terus-menerus. Model ini terdiri dari empat komponen utama: Context (Konteks), Input (Masukan), Process (Proses), dan Product (Produk). Setiap komponen dalam model ini memiliki fungsi spesifik untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berikut adalah bagaimana pembahasan hasil penelitian ini terkait dengan teori CIPP oleh Stufflebeam:

#### **1. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)**

Evaluasi konteks dalam model CIPP bertujuan untuk memahami kondisi awal dan kebutuhan program. Ini membantu dalam menetapkan tujuan yang relevan dan spesifik, serta memastikan bahwa program didasarkan pada kebutuhan nyata dari para stakeholder.

Dalam penelitian ini, evaluasi konteks di Perpustakaan Mukhrim menunjukkan bahwa program inklusi sosial didirikan berdasarkan kebutuhan literasi dan akses informasi di Desa Harapan Baru. Sesuai dengan teori Stufflebeam, hasil evaluasi konteks ini memastikan bahwa program ini

relevan dan dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini mendukung tujuan utama dari evaluasi konteks yaitu memastikan bahwa tujuan program selaras dengan kebutuhan dan kondisi awal. Secara teoritis, Context dalam model CIPP berfungsi untuk mengevaluasi sejauh mana program yang dirancang selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi konteks membantu dalam menentukan kebutuhan, peluang, masalah, dan tujuan yang akan dicapai melalui program. Dalam kasus ini, program perpustakaan berperan sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi dan memberdayakan masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih luas terhadap sumber daya informasi yang relevan dengan kehidupan mereka.

## 2. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Evaluasi input dalam model CIPP bertujuan untuk menilai sumber daya yang tersedia, serta strategi dan rencana yang akan digunakan dalam pelaksanaan program. Ini termasuk penilaian terhadap sumber daya manusia, material, finansial, dan metodologi yang dirancang untuk mencapai tujuan program.

Hasil evaluasi input di Perpustakaan Mukhrim menunjukkan keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga kerja maupun anggaran. Sesuai dengan teori Stufflebeam, evaluasi input ini penting untuk memahami apakah sumber daya yang ada memadai untuk mencapai tujuan program. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi tambahan, seperti kemitraan dengan pihak eksternal, untuk mengatasi keterbatasan ini dan meningkatkan efektivitas program. Ini sejalan dengan tujuan evaluasi input yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya secara optimal.

Evaluasi Input berfokus pada sumber daya yang digunakan, termasuk perencanaan, strategi, dan material yang mendukung pelaksanaan program. Di Perpustakaan Mukhrim, program ini didukung oleh berbagai sumber daya seperti bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan

masyarakat, akses teknologi informasi untuk meningkatkan literasi digital, dan pelatihan bagi pustakawan agar mampu mengelola program dengan lebih baik. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa dan komunitas lokal juga menjadi bagian integral dari sumber daya input.

Teori yang mendasari evaluasi input dalam model CIPP menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan program. Stufflebeam (2007) menjelaskan bahwa input harus dievaluasi untuk menentukan apakah sumber daya yang ada sudah memadai dan efektif untuk mendukung pelaksanaan program. Dalam konteks ini, evaluasi input akan melihat apakah bahan bacaan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apakah pelatihan pustakawan efektif, dan apakah fasilitas teknologi informasi memadai untuk mendukung program inklusi sosial.

### 3. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Evaluasi proses dalam model CIPP bertujuan untuk memantau pelaksanaan program dan memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana. Ini melibatkan penilaian terhadap bagaimana program dijalankan, apakah ada hambatan yang dihadapi, dan bagaimana respons terhadap tantangan tersebut.

Evaluasi proses di Perpustakaan Mukhrim menunjukkan bahwa meskipun program dilaksanakan sesuai rencana, terdapat masalah dengan partisipasi masyarakat, terutama dari kelompok yang menjadi target utama program. Sesuai dengan teori Stufflebeam, evaluasi proses ini memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan dan mengarahkan perbaikan segera agar program tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, monitoring yang berkelanjutan dan respons adaptif terhadap tantangan adalah inti dari evaluasi proses menurut Stufflebeam.

Evaluasi Proses mengevaluasi bagaimana program dilaksanakan, termasuk metodologi yang digunakan, partisipasi masyarakat, serta



monitoring dan penyesuaian selama pelaksanaan program. Di Perpustakaan Mukhrim, program ini diterapkan melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat diajak untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Misalnya, kegiatan literasi diadakan dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk membaca bersama, diskusi kelompok, dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Evaluasi proses ini penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana program berjalan dan apa saja hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan. Menurut Scriven (1991), evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang membantu dalam memahami dan memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan. Ini memungkinkan adanya umpan balik real-time yang dapat digunakan untuk membuat penyesuaian selama program berlangsung.

### C. Product Evaluation (Evaluasi Produk)

Evaluasi produk dalam model CIPP bertujuan untuk menilai hasil dan dampak dari program. Ini termasuk penilaian terhadap hasil langsung dan jangka panjang, serta efektivitas keseluruhan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, evaluasi produk menunjukkan peningkatan literasi dan keterampilan di kalangan peserta, tetapi dampak jangka panjangnya masih belum terlihat secara penuh. Stufflebeam menekankan bahwa evaluasi produk tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga membantu menentukan apakah program perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Hasil ini sejalan dengan teori CIPP, di mana evaluasi produk memberikan dasar untuk keputusan mengenai keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari program.

Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dari program, baik secara langsung (output) maupun dampak jangka panjang (outcome). Di Perpustakaan Mukhrim, beberapa hasil langsung dari program ini mencakup

peningkatan literasi, pengembangan keterampilan baru bagi anggota masyarakat, dan peningkatan kesadaran tentang pentingnya inklusi sosial. Dampak jangka panjangnya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan kohesi sosial di Desa Harapan Baru.

Menurut Stufflebeam (2003), evaluasi produk harus mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan program dan kontribusinya terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Ini melibatkan pengukuran hasil langsung dari program serta dampak yang lebih luas yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Kendala seperti kurangnya partisipasi masyarakat, masalah komunikasi dengan pihak lembaga luar, dan keterbatasan anggaran dana dapat dianalisis melalui empat aspek utama dari teori ini. Pertama, dari segi konteks, kendala berupa kurangnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya ketidakcocokan antara tujuan program dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya memahami atau memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat lokal.

Dalam teori CIPP, evaluasi konteks mencakup penilaian terhadap kondisi dan kebutuhan yang relevan. Jika masyarakat tidak merasa terlibat atau tidak melihat manfaat langsung dari program, ini bisa berarti program perlu disesuaikan lebih baik dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami latar belakang dan situasi lokal guna memastikan bahwa program dapat lebih relevan dan menarik bagi masyarakat. Selanjutnya, dalam aspek input, masalah komunikasi dengan pihak lembaga luar menjadi kendala signifikan. Input mencakup semua sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan dukungan dari lembaga luar. Komunikasi yang buruk dapat menghambat aliran sumber daya atau dukungan yang diperlukan, mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluasi input dalam konteks ini berarti menilai apakah perencanaan dan pengorganisasian sumber daya sudah dilakukan dengan baik. Jika komunikasi dengan

lembaga luar tidak efektif, maka mungkin perlu diperbaiki dengan strategi komunikasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan untuk memastikan dukungan yang memadai. Terakhir, dalam aspek proses, keterbatasan anggaran dana mempengaruhi bagaimana program dilaksanakan dan dikelola.

Proses melibatkan pengelolaan dan implementasi program. Dengan anggaran yang terbatas, mungkin ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan atau kualitas program. Evaluasi proses dalam hal ini berfokus pada bagaimana anggaran digunakan dan apakah pengelolaan keuangan sudah efisien. Keterbatasan dana menunjukkan perlunya penyesuaian dalam perencanaan anggaran serta pengelolaan yang lebih efektif untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Dengan menganalisis kendala-kendala ini menggunakan teori CIPP, kita dapat memahami bagaimana setiap aspek konteks, input, proses, dan produk berkontribusi terhadap hasil akhir dari program. Identifikasi kendala seperti kurangnya partisipasi, masalah komunikasi, dan keterbatasan anggaran memberikan wawasan tentang area yang perlu diperbaiki, sehingga program dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.